

# Analisis Bibliometrik Isu Kewarganegaraan Kontemporer: Radikalisme, Intoleransi, Korupsi, Disintegrasi Bangsa serta Pendekatan Solusinya

Obib Madhandi Pratama<sup>1</sup>, Nur Habiba<sup>2</sup>, Raisah Fathinah Kaltsum<sup>3</sup>, Renita Apreli Yolanda<sup>4</sup>

<sup>12</sup>Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

obibgg@gmail.com<sup>1</sup>, habibanhb@gmail.com<sup>2</sup>, raisabkl23@gmail.com<sup>3</sup>, renitaapreliy@gmail.com<sup>4</sup>

## Abstract

This research aims to identify keyword trends in articles published by other researchers that relate to the discussion topic of contemporary citizenship issues. The key issues highlighted in these articles include radicalism, intolerance, corruption, and national disintegration. Furthermore, solution approaches that can be applied to address these issues will also be discussed. The bibliometric analysis was conducted by searching for relevant articles using the Publish or Perish application, after which the article data was analyzed using VOSviewer. The results of this analysis are presented as a keyword network map. The study found 17 relevant articles containing 171 keywords, which were then narrowed down to the four most frequent keywords. By observing the relationship patterns of these keywords, we can conclude what constitutes contemporary citizenship issues.

**Keyword: Contemporary Citizenship Issues, Radicalism, Intolerance, Corruption, National Disintegration;**

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat tren kata kunci dari artikel yang dipublikasikan oleh peneliti lain yang berkaitan dengan topik pembahasan yaitu isu kewarganegaraan kontemporer. Isu-isu yang menjadi sorotan utama dalam artikel ini meliputi radikalisme, intoleransi, korupsi dan disintegrasi bangsa. Selain itu akan dibahas juga pendekatan solusi yang bisa diterapkan dalam menghadapi isu-isu tersebut. Analisis bibliometrik yang dilakukan adalah dengan mencari artikel-artikel yang relevan di aplikasi Publish or Perish yang kemudian data artikel tersebut dianalisis menggunakan VOSViewer. Hasil dari analisis ini berupa pemetaan jaringan kata kunci. Dari penelitian diperoleh 17 artikel yang relevan dengan 171 kata kunci yang kemudian disempitkan menjadi 4 kata kunci yang paling banyak. Dengan melihat pola hubungan kata kunci ini kita bisa menyimpulkan apa itu isu kewarganegaraan kontemporer.

**Kata Kunci: Isu-isu Kewarganegaraan Kontemporer, Radikalisme, Intoleransi, Korupsi, Disintegrasi Nasional;**



## PENDAHULUAN

Dunia teknologi semakin hari semakin maju, termasuk teknologi informasi dan komunikasi. Di era kontemporer akses informasi menjadi semakin mudah, dulu mungkin kita hanya bisa melihat berita dari koran, radio, ataupun televisi. Untuk mengakses internet pun kita hanya bisa mengaksesnya melalui komputer canggih. Begitupun komunikasi dulu kita hanya bisa berselancar di dunia maya menggunakan akses internet dari komputer. Namun, di era sekarang akses internet bisa kita dapatkan dengan menggunakan smartphone, kita bisa mengakses internet untuk membaca berita maupun berinteraksi dengan orang lain kapanpun dan dimanapun selama ada akses internet. Namun, hal tersebut juga membawa dampak negatif yang bisa merugikan manusia. Salah satu aspek yang terkena dampak negatif dari kemudahan akses informasi dan komunikasi ini adalah aspek kewarganegaraan. Kewarganegaraan merupakan aspek penting yang menjadi syarat suatu negara, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 pasal 1 ayat 2, kewarganegaraan adalah seluruh hal ikhwal yang berkaitan dengan warga negara. Sedangkan warga negara sendiri merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara. Keutuhan suatu negara bisa dilihat dari kesejahteraan warga negaranya. Namun, di era sekarang masih sering muncul isu-isu kewarganegaraan yang dapat mengancam keutuhan negara. Isu-isu ini bisa disebabkan oleh derasnya arus informasi yang bisa dijangkau dari mana saja.

Salah satu isu kewarganegaraan yang masih sering terjadi di masa sekarang adalah isu radikalisme. Menurut Arham (2023), radikalisme merujuk pada sikap atau pandangan yang ekstrem dan cenderung untuk merubah atau menggulingkan tatanan sosial atau politik yang ada. Dalam era kontemporer penyebaran paham radikalisme sering kali muncul lewat media sosial, kemajuan media sosial dan teknologi memudahkan ideologi ekstremis berkembang biak, sehingga membuat generasi muda lebih rentan terhadap pengaruh tersebut (Hidayatullah dkk., 2020). Dengan kecanggihan teknologi informasi, pesan radikal dapat disajikan dalam berbagai format menarik seperti video, grafis, hingga meme, yang memudahkan penyebarannya dan meningkatkan daya tarik bagi audiens (Nugroho et al. 2024). Penyebaran paham radikalisme di media sosial ini merupakan isu yang serius, bahkan di tahun 2024 BNPT dan Kominfo memblokir hingga 180.954 konten di media sosial yang bermuatan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Dengan jumlah sebanyak itu, media sosial memang menjadi tempat yang rentan terhadap ancaman penyebaran paham radikalisme. Menurut (Asrori, 2015) munculnya paham radikalisme di Indonesia disebabkan dua faktor. Faktor internal bersumber dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Hal ini terjadi karena adanya salah penafsiran yang dilakukan oleh seseorang. Dirinya berusaha menyebarkan penafsirannya ke orang yang mudah untuk didoktrin agar banyak orang yang sepemikiran dengan dirinya. Akibatnya, beberapa masyarakat tersebut akan melakukan penyimpangan dari norma dan nilai Pancasila, serta menumbuhkan paham radikalisme yang semakin banyak di Indonesia. Sementara itu, faktor eksternal berasal dari luar masyarakat Indonesia. Artinya, ada campur tangan dari pihak luar yang menginginkan perpecahan terjadi di negara Indonesia.

Selain penyebaran radikalisme, isu kewarganegaraan yang seringkali kita lihat di media sosial adalah ujaran kebencian terhadap individu maupun kelompok tertentu. Ujaran kebencian ini merupakan salah satu bentuk dari perilaku intoleransi. Di ranah pedagogi, keberadaan media sosial juga sangat efektif sebagai medium edukasi. Namun, tak dapat dipungkiri media sosial juga banyak digunakan untuk hal-hal negatif, misalnya sebagai sarana untuk menyebar hoax, pencemaran nama baik, media provokasi, media fundamentalisme agama dan intoleransi (Setiadi dalam Perssela et al. 2022). Intoleransi sendiri merupakan kebalikan dari toleransi, yang dalam KBBI didefinisikan sebagai sikap atau sifat toleran yaitu kemampuan untuk menghargai, membiarkan, atau membolehkan sesuatu yang berbeda atau bertentangan, seperti pendapat, kepercayaan, atau kebiasaan orang lain. Maka dapat disimpulkan bahwa Intoleransi adalah sikap yang menolak adanya perbedaan. Banyak orang di media sosial memiliki sikap eksklusif yang dibenarkan oleh doktrin agama, yang merupakan tanda yang sangat mengkhawatirkan bahwa mereka tidak memahami bagaimana menegakkan hak-hak demokrasi dalam beragama (Chusniyah et al., 2020). Menurut Kabag Mitra Biro Penmas Divisi Humas Polri, Kombes Awi Setiyono, ada empat faktor pemicu konflik intoleransi di Indonesia. Pertama, perbedaan pandangan dalam memahami ajaran secara tekstual menghasilkan pengalaman yang berbeda di antara umat beragama. Kedua, aksi pemaksaan hak asasi oleh kaum mayoritas terhadap minoritas, termasuk

pemakaian atribut keagamaan secara berlebihan dan sombong. Ketiga, perbedaan adat istiadat juga dapat menjadi pemicu konflik, terutama jika disertai fanatisme kesukuan yang berlebihan. Keempat, ketidakadilan dari pihak aparaturnya negara atau pemerintah dalam menangani konflik dapat memperburuk situasi, dengan pemihakan pada salah satu kubu karena alasan seperti uang, agama, golongan, atau kasta. Menurut laporan SETARA Institute, sepanjang tahun 2023–2024 terjadi 477 peristiwa dan 731 tindakan intoleransi di Indonesia. Bahkan, 159 tindakan dilakukan oleh aktor negara seperti pejabat publik dan aparat hukum, sementara 243 tindakan berasal dari masyarakat sipil. Ini menunjukkan bahwa intoleransi bukan hanya masalah sosial, tetapi juga menyangkut kebijakan dan implementasi hukum.

Selain itu dengan akses informasi yang mudah kita bisa melihat juga bahwa kasus korupsi di Indonesia masih sering terjadi. Menurut Syed Hussein Alatas (dalam Kantale, 2025), menyatakan bahwa korupsi adalah transaksi yang tidak jujur yang dapat menimbulkan kerugian orang, waktu dan tenaga dari pihak lain, baik berupa penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*) dan nepotisme. Ketiga fenomena tersebut tidaklah sama, tapi ada benang merah yang menghubungkan fenomena tersebut, yaitu penempatan kepentingan-kepentingan politik di bawah kepentingan privat dengan pelanggaran norma-norma tugas dan kesejahteraan, yang dibarengi dengan keserbarahasiaan, penghianatan, penipuan, dan pengabaian yang kejam atas setiap konsekuensi yang diderita oleh publik. Dalam era kontemporer isu korupsi ini seringkali menjadi sorotan di media sosial, bahkan di tahun 2025 ini beberapa kasus korupsi sempat menjadi trending topic di media sosial, contohnya kasus korupsi PT Timah di Bangka Belitung. Seperti yang dilansir dari laman Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, korupsi PT Timah yang merugikan keuangan negara sebesar 271 triliun rupiah berupa kerusakan lingkungan akibat tambang timah ilegal.

Kemudian ada juga isu kewarganegaraan yang sering muncul beritanya yaitu disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa ini sangat berbahaya karena berkaitan dengan keutuhan negara. Disintegrasi bangsa ini bisa juga disebabkan oleh isu-isu kewarganegaraan lainnya. Kasus disintegrasi bangsa di masa sekarang yang sering kita lihat beritanya ada Organisasi Papua Merdeka yang sampai sekarang masih terlibat pertikaian dengan TNI. Kalau kita telusuri kasus-kasus disintegrasi bangsa yang pernah terjadi di Indonesia ada kaitannya dengan radikalisme dan intoleransi. Tindakan intoleransi yang berkepanjangan bisa mengarah ke paham radikalisme, sedangkan radikalisme bisa memicu adanya disintegrasi bangsa. Seperti yang dikatakan Umar (2019), maraknya tindakan radikal dan intoleransi dalam kehidupan masyarakat sangat mungkin menjadi penyebab sekaligus konsekuensi timbulnya disintegrasi masyarakat. Radikalisme sendiri bisa disebabkan oleh adanya sikap intoleransi dari kalangan tertentu, kemudian pihak yang mendapat tindakan intoleransi ini tadi bisa memiliki pemikiran radikal atau mudah terpapar paham radikal. Para penganut paham radikal ini biasanya membentuk kelompok yang bertujuan untuk mengubah tatanan negara. Ada beberapa faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya disintegrasi bangsa (Astawa et al. 2024):

1. Faktor Internal, Penyebab internal berkaitan dengan kualitas individu dalam suatu negara. Hal ini sering muncul akibat salah penafsiran atau pemahaman terhadap nilai-nilai budaya, yang berujung pada perilaku intoleran, sikap etnosentrisme, hingga penggunaan bahasa yang kurangsopan.
2. Faktor Kultural, faktor ini berhubungan dengan nilai, mentalitas, dan perilaku masyarakat. Sistem budaya yang kurang menekankan keharmonisan sosial dapat memunculkan kelompok yang tidak saling menghargai budaya lain, hingga melakukan tindakan yang merugikan masyarakat.
3. Faktor Struktural, disintegrasi juga dapat dipicu oleh struktur kekuasaan yang tidak adil, seperti ketimpangan ekonomi, meningkatnya pelanggaran HAM, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan kebijakan pusat yang tidak merata terhadap daerah. Perbedaan Ideologi, setiap negara memiliki ideologi resmi yang harus dijunjung oleh warganya. Jika ada ideologi lain yang bertentangan, seperti Marxisme atau Komunisme di Indonesia yang menganut Pancasila, hal ini dapat mengancam persatuan bangsa. Ketimpangan Demografi, ketidakseimbangan dalam distribusi

penduduk dan kebutuhan dapat memicu persaingan antarwarga. Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial yang berpotensi memecah belah masyarakat.

4. Iklim Politik yang Tidak Sehat, politik yang dipertandingkan untuk kepentingan pribadi dapat memicu perpecahan, seperti demonstrasi dan konflik sosial yang sering terjadi akibat manipulasi politik.
5. Rendahnya Tingkat Toleransi, toleransi terhadap perbedaan adalah pilar penting dalam kehidupan berbangsa. Ketika masyarakat gagal menghormati perbedaan agama, suku, ras, dan kondisi sosial, potensi perpecahan menjadi semakin besar.
6. Terhambatnya Ekonomi, kesenjangan ekonomi yang meningkat, disertai dengan tingginya tingkat pengangguran, dapat memicu ketimpangan sosial dan kriminalitas. Kondisi ini pada akhirnya memperburuk kohesi sosial dalam masyarakat.

Untuk menghindari terjadinya disintegrasi bangsa maka dibutuhkan pendekatan solusi. Pendekatan solusi ini harus dimulai sedini mungkin sejak bangku sekolah sehingga diharapkan generasi masa depan dapat terhindar dari paham radikalisme. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan penanaman nilai-nilai Pancasila sejak dini. Untuk menghindari ancaman penyebaran paham radikalisme di media sosial pemerintah juga harus berkolaborasi dengan pihak konten yang berbau ajakan radikalisme. Sikap intoleransi bisa diatasi dengan mengajarkan sikap saling menghargai, semua manusia itu sama di mata Tuhan. Kasus developer untuk memberantas korupsi di Indonesia seringkali muncul karena masih maraknya politik uang. Para calon wakil rakyat dan pemimpin ini sering mengeluarkan banyak modal untuk menarik minat masyarakat. Akibat dari banyaknya modal tersebut mereka akan memilih cara kotor supaya bisa mendapat keuntungan, yaitu melakukan korupsi. Pemerintah melalui Bawaslu hendaknya lebih gencar melakukan patroli selama pelaksanaan pemilu.

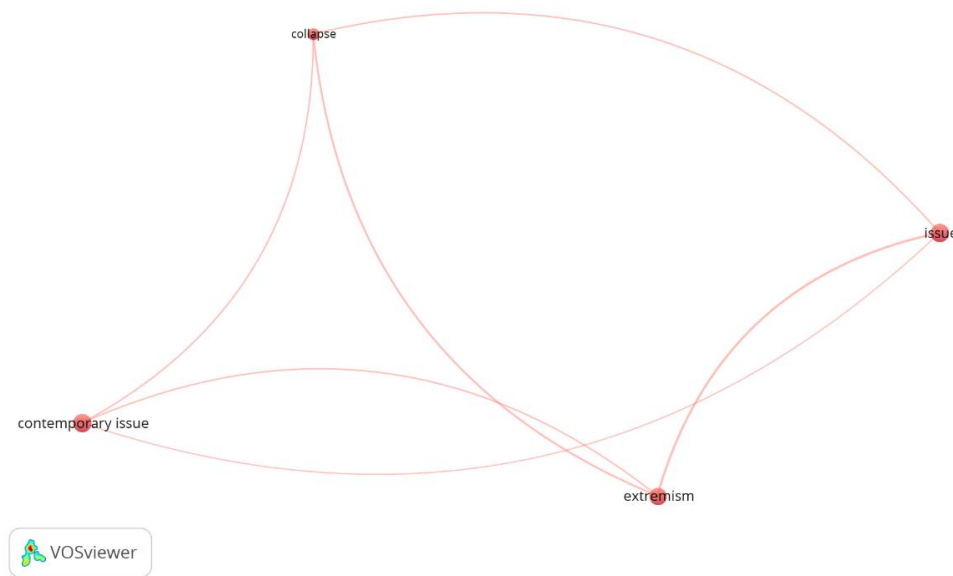
## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis bibliometrik pada penelitian terdahulu yang terindeks Google Scholar. Analisis bibliometrik merupakan metode evaluasi penelitian yang berdasarkan pada karya tulis sebelumnya (Ellegaard & Wallin, 2015). Di tingkat global, bibliometrika telah digunakan secara intensif untuk memetakan penelitian tentang COVID-19, perubahan iklim, teknologi digital, dan isu-isu kontemporer lainnya (Kousha dan Thelwall, 2020). Sejalan dengan topik pada penelitian ini yang membahas isu-isu kewarganegaraan kontemporal.

## PEMBAHASAN

Peneliti mencari data menggunakan aplikasi *Publish or Perish* (PoP), dengan memasukkan judul penelitian *Contemporary Issues* dan menggunakan kata kunci *radicalism, intolerance, corruption, national disintegration*. Dan untuk mendapatkan hasil penelitian kontemporer peneliti menggunakan rentang waktu 15 tahun terakhir yaitu 2010-2025, sehingga ditemukan 17 judul penelitian terkait. Data hasil pencarian ini selanjutnya akan disimpan dalam bentuk file bibliografi dengan format ris (*research information system*).

Data bibliografi tersebut selanjutnya akan dianalisis bibliometrik menggunakan VOSViewer. Dalam aplikasi VOSviewer terdapat *network visualization* yang digunakan untuk memvisualisasi data dalam melihat kuatnya hubungan antar jaringan penelitian, untuk menggambarkan jejak historis berdasarkan tahun diterbitkannya penelitian maka digunakan *Overlay visualization*. Sedangkan untuk memvisualisasikan kerapatan atau penekanan pada kelompok penelitian dapat dilihat menggunakan *density visualization* (Zakiyyah et al., 2022)..



Gambar 1 Network Visualization Vosviewer

Hasil dari analisis bibliometrik menghasilkan 171 kata kunci dari 17 penelitian terdahulu yang relevan. Tapi setelah disaring terdapat 4 kata kunci dengan *occurrence* terbanyak. Kata kunci *issue* dan *contemporary issue* merupakan topik utama pada penelitian ini. Selanjutnya ada *extremism* yang merupakan perwujudan dari sikap intoleransi dan radikalisme yang menyebar dalam kelompok yang lebih besar. Sehingga bisa menjadi organisasi ekstremis yang bisa berbahaya dalam lingkup global, contohnya ISIS. Selanjutnya adalah *collapse* yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai runtuh. Yang merupakan dampak akhir dari isu-isu kontemporer ini jika terus berkepanjangan. Sebuah negara akan runtuh jika mengalami disintegrasi bangsa, sedangkan disintegrasi bangsa bisa terjadi jika isu kewarganegaraan lain semakin meningkat. Intoleransi yang berlebih bisa menimbulkan pemikiran radikal, kemudian radikalisme bisa menyebabkan munculnya kelompok pemberontak yang bisa menimbulkan ancaman disintegrasi bangsa. Begitupun dengan korupsi, jika semakin banyak instansi pemerintahan yang melakukan korupsi, maka bisa membuat rakyat semakin sengsara sehingga menimbulkan pemikiran radikal.

## KESIMPULAN

Isu-isu Kewarganegaraan kontemporer semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Arus informasi menjadi kunci yang bisa meningkatkan kasus Kewarganegaraan kontemporer ini. Isu tersebut meliputi radikalisme, intoleransi, korupsi dan integrasi bangsa. Radikalisme bisa disebarkan melalui media sosial, sehingga orang yang mudah dihasut akan ikut terjerumus. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan meningkatkan sistem penjangkaran konten oleh pemerintah. Selain radikalisme, isu intoleransi juga berkembang di media sosial sehingga dapat menjadi tantangan bagi masyarakat. Isu korupsi yang semakin hari semakin marak, bisa membuat rakyat semakin sengsara dan menimbulkan pemikiran radikal dan bisa membuat disintegrasi bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astawa, I. K., Asyla, A. R., Putri, A., Agatha, C. C., Nurcahyo, D., Julianti, I., & Octaviani, S. E. (2025). Masalah disintegrasi bangsa. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*. 4.1 2024
- Badaan, Vivienne, and John T. Jost, 'Conceptual, Empirical, and Practical Problems with the Claim That Intolerance, Prejudice, and Discrimination Are Equivalent on the Political Left and Right', in *Current Opinion in Behavioral Sciences*, preprint, 2020, XXXIV, doi:10.1016/j.cobeha.2020.07.007

- Chusniyah, Tutut, Fattah Hidayat, and Maulanal Kirom Firdaus, 'Perbedaan Intoleransi Politik Jamaah Nahdlatul Wathan Terhadap Jamaah Ahmadiyah Ditinjau Dari Gender', *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 10.2 (2020), doi:10.47200/ulumuddin.v10i2.427
- Deti, Salsabila, and Dini Anggraeni Dewi, 'Pengimplementasian Nilai-Nilai Pancasila Untuk Mencegah Radikalisme Di Indonesia', *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 5.1 (2021), doi:10.33487/edumaspul.v5i1.1279
- Ellegaard, Ole, and Johan A. Wallin, 'The Bibliometric Analysis of Scholarly Production: How Great Is the Impact?', *Scientometrics*, 105.3 (2015), doi:10.1007/s11192-015-1645-z
- Hafid, Wahyudin, 'Geneologi Radikalisme Di Indonesia (Melacak Akar Sejarah Gerakan Radikal)', *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1.1 (2020), doi:10.33096/altafaqquh.v1i1.37
- Kantale C, Bawole H.Y., Wongkar V.A., Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Pemerintah Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa, *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 15.5 (2025)
- Nugroho, Prastyawan, Andri Sutrisno, and Cecep Aminudin, 'Media Sosial Dan Radikalisme: Bagaimana Teknologi Informasi Mempengaruhi Pemikiran Ekstrem', *HUMANIORUM*, 1.4 (2024), doi:10.37010/hmr.v1i4.31
- Putra Perssela, Rangga, Rajab Mahendra, and Winda Rahmadiani, 'Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektivitas Komunikasi', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (JIMAKUKERTA)*, 2.3 (2022), doi:10.36085/jimakukerta.v2i3.4525
- Rijal Arham, Eksplorasi Dinamika Islam, Radikalisme, Dan Demokrasi Dalam Masyarakat Kontemporer, *JIES (Journal of Islamic Education Studies)*, 2.1 (2023)
- Umar, Bambang Widodo, 'Polisi Dalam Arus Radikalisme, Intoleransi, Dan Disintegrasi Bangsa', *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 11.2 (2019), doi:10.35879/jik.v11i2.82
- Zakiyyah, Fina Nurul, Yunus Winoto, and Rohanda Rohanda, 'Pemetaan Bibliometrik Terhadap Perkembangan Penelitian Arsitektur Informasi Pada Google Scholar Menggunakan VOSviewer', *Informatio: Journal of Library and Information Science*, 2.1 (2022), doi:10.24198/inf.v2i1.37766.